

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

APRILIA SUDARSIH

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: aprilliasudarsi3@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of employee payroll accounting information systems at the Regional Financial and Asset Management Agency of Kuantan Singingi Regency. The research method used is descriptive method. The data of this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used are documentation, interviews, and observation. The data analysis technique used is by comparing the employee payroll accounting information system at the BPKAD in Kuantan Singingi Regency with the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs

Regulation Number 64 of 2013 concerning the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards to Local Governments and conducting comparative payroll system analysis on BPKAD.

The results of it shows that the Employee Payroll Accounting Information System Implementation conducted by BPKAD is not in accordance with Permendagri No.64 of 2013. because there were several problems encountered regarding the completeness of the related functions and the accounting records used. However, from the findings of the employee payroll accounting information system on BPKAD it has been running effectively.

Keywords: *Payroll Accounting Information System, Payroll Procedure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara membandingkan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan melakukan analisis perbandingan sistem penggajian pada BPKAD.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai yang dilakukan oleh BPKAD tidak sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2013 . karena ada beberapa masalah yang ditemui mengenai kelengkapan fungsi terkait dan catatan akuntansi yang digunakan. Namun, dari hasil temuan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD sudah berjalan secara efektif.

Kata kunci : *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian, Prosedur Penggajian.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor lain seperti modal (Marihot, 2002: 2). Menurut Sukmawati (2015: 5) Sumber daya manusia merupakan satusatunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan nya.

Semakin berkembangnya suatu instansi maka akan memerlukan lebih banyak pegawai. Untuk itu diperlukan konsentrasi khusus dalam menangani masalah kepegawaian yang sangat penting adalah menyangkut sistem pembayaran gaji pegawai. Pada pelaksanaan pembayaran gaji pegawai harus dilaksanakan secara profesional dengan maksud agar terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara instansi dengan pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan selaras dan seimbang.

Menurut Marshall dan Paul (2015: 10) “Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan”. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik maka manajemen bisa memperoleh berbagai macam informasi khususnya yang menyangkut informasi keuangan yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi yang ada di perusahaan atau organisasi meliputi sistem informasi akuntansi piutang, sistem informasi akuntansi utang, sistem informasi akuntansi penggajian dan lainlain.

Sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi, organisasi, formulir, catatan, dan laporan tentang penggajian pada karyawan yang dibayar tiap bulan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan (Baridwan, 1990:373).

Suatu instansi sebaiknya mempunyai sistem informasi penggajian yang baik, karena bila instansi tersebut tidak memiliki suatu sistem informasi penggajian yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Pencegahan penyelewengan dapat dilakukan dengan adanya pemisahan tugas atau fungsi yang tegas antara fungsi operasional, fungsi otorisasi, dan fungsi pencatatan. Adanya sistem otorisasi dan pencatatan penggajian yang baik. Adanya praktek yang sehat dalam sistem informasi akuntansi penggajian maka diharapkan dapat dihasilkan informasi akuntansi tentang penggajian yang memadai tepat waktu dan akurat (Irfan, 2018: 2).

Setiap instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peraturan pemerintah yang menjadi pedoman untuk penelitian ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai acuan penelitian menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Gagas (2017). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gagas ini adalah pada variabel yang diteliti yaitu menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian pegawai. Kemudian perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gagas

adalah pada penelitian terdahulu peneliti mengambil sampel di Sekretariat Daerah Kota Singkawang sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gagas (2017), hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang belum Sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dikarenakan belum lengkapnya catatan akuntansi yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem

Pengertian Sistem Menurut Krismiaji (2015:1) sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. **2.1.2 Pengertian Akuntansi**

Pengertian Akuntansi Menurut Halim (2004: 4) Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut Marshall dan Paul (2015: 10) “Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan”.

2.1.4 Penggajian

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang di beri tugas-tugas administrative dan pimpinan yang jumlah biasanya tetap secara bulanan atau tahunan. Di samping itu pegawai mungkin memperoleh manfaat yang diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan hari raya, uang transport, uang makan dan lainlain. (Soemarso S. R, 2005 : 355).

2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Sistem informasi akuntansi penggajian untuk kebanyakan perusahaan/organisasi yaitu suatu sistem, prosedur dan catatan atau formulir yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan akurat berapa gaji yang harus diterima oleh setiap pegawainya, berapa gaji yang harus dipotong, misalnya untuk pajak penghasilan pegawai, pinjaman pegawai pada perusahaan serta gaji serta sisa gaji yang benar-benar dibayarkan kepada pegawai (Wilkinson, 1995:235).

Didalam instansi pemerintah daerah gaji pegawai yang dikeluarkan itu termasuk kedalam belanja tidak langsung yang disebut belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. uang representasi dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai (Erlina,dkk, 2015: 155)

Prosedur akuntansi belanja dan beban OPD untuk akuntansi pengeluaran Kas menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yaitu:

Fungsi yang Terkait Dalam Prosedur Penggajian

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. Bendahara Pengeluaran
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dokumen yang digunakan

1. Surat Penyedia Dana (SPD)
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Bukti Transfer

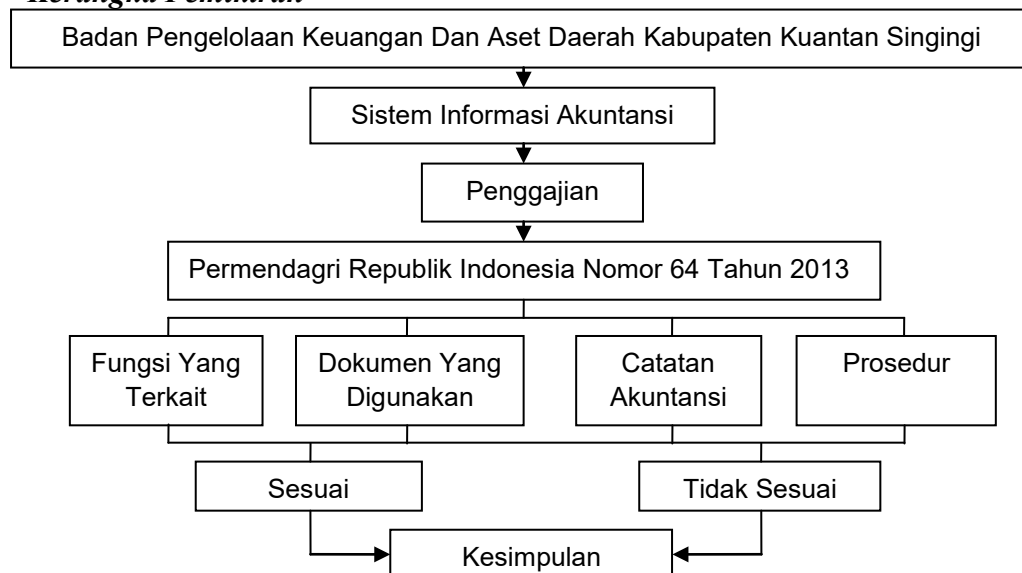
Catatan akuntansi yang digunakan

1. Buku jurnal pengeluaran kas
2. Buku besar
3. Buku besar pembantu

Prosedur Penggajian

1. Prosedur Penerbitan SPD
2. Prosedur Penerbitan SPP
3. Prosedur Penerbitan SP2D

2.2 Kerangka Pemikiran



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2014: 53).

3.2 Teknik Pengumpulan Data Menurut Nasir (2014: 211) “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya

akan memungkinkan generalisasi yang objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang penggajian pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Hasil wawancara selanjutnya dicatat sebagai data penelitian. Pihak yang diwawancarai adalah Kepala Bagian Belanja Daerah, bendahara, dan bagian akuntansi pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data secara subjektif tentang bagaimana Sistem akuntansi penggajian yang diterapkan di BPKAD diantaranya: fungsi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian, dokumen apa sajakah yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian, dan catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian pada BPKAD.

3. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku yang relevan dan kondisi lingkungan yang tersedia di lapangan penelitian. Metode observasi yaitu salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat, mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Basrowi dan Suwandi, 2008: 94). Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kejadian operasional perusahaan yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Penilaian prosedur penggajian pegawai dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu pihak pelaksana penggajian sehingga diperoleh jawaban berkaitan dengan pokok penelitian. Disamping itu proses dan analisa data menggunakan langkah *editing*, yang merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran jawaban yang diperoleh dari responden melalui wawancara sehingga data yang diperoleh akan sesuai dengan pokok penelitian.

Untuk membandingkan hasil temuan lapangan mengenai sistem akuntansi penggajian di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Langkah-langkahnya adalah:

1. Membandingkan fungsi organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian.
2. Membandingkan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian

3. Membandingkan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian.
4. Membandingkan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian.
5. Menilai sistem akuntansi penggajian yang berjalan pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbandingan Permendagri No. 64 tahun 2013 dan Praktik berkaitan fungsi yang ada pada Sistem Akuntansi Penggajian BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Fungsi Terkait	Praktik		Penjelasan
	Ada	Tidak	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		√	Fungsi ini dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan belanja langsung. Sedangkan gaji termasuk kedalam belanja tidak langsung.
Bendahara Pengeluaran	√		Fungsi ini bertugas memverifikasi dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Bendahara Pengeluaran juga berfungsi untuk mencatat Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dan Bendahara Pengeluaran juga bertugas mencatat bukti-bukti pembelanjaan dana langsung.
Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD	√		Fungsi ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan menandatangani SPP
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	√		Fungsi ini bertugas membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) yang merupakan pembuatan anggaran untuk pencairan dana yang diajukan oleh OPD. Selanjutnya Kuasa BUD juga bertugas melakukan pengujian SPM dan menerbitkan SP2D.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	√		Fungsi ini bertugas membuat surat permintaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD), dan juga menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) gaji.

Dari tabel 4.4 hasil perbandingan fungsi terkait sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD dengan Kajian teori Permendagri No. 64 Tahun 2013 dapat dilihat bahwa fungsi terkait sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD sudah sesuai dengan teori Permendagri No. 64 Tahun 2013. Walaupun sistem penggajian PNS pada BPKAD ini hanya menggunakan 4 fungsi terkait yaitu Bendahara pengeluaran, Pejabat penatausahaan keuangan OPD, Kuasa BUD, dan pengguna anggaran.

Sedangkan menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 fungsi terkait sistem penggajian itu ada 5 fungsi terkait sistem akuntansi penggajian pegawai. Tetapi dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 Untuk sistem akuntansi penggajian PNS itu cukup menggunakan 4 fungsi terkait saja, karena untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan itu hanya digunakan untuk fungsi terkait sistem penggajian Honorer. Fungsi PPTK di dalam prosedur sistem informasi akuntansi penggajian PNS tidak digunakan karena untuk prosedur penggajian PNS hanya dibutuhkan 4

fungsi terkait yaitu, Bendahara Pengeluaran, kuasa bendahara umum daerah, pejabat penatausahaan keuangan OPD, dan Pengguna anggaran. Sedangkan untuk sistem penggajian Non PNS (Honorar) diharuskan menggunakan fungsi ini, dikarenakan prosedur penggajian Honorar itu termasuk ke dalam belanja langsung. (Erlina, 2015 : 171)

Adapun alasan BPKAD tidak menggunakan 1 fungsi yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan dikarenakan fungsi tersebut dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan belanja langsung yaitu pembayaran gaji Honorar, sedangkan gaji PNS termasuk belanja tidak langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gagas (2017) dengan judul penelitian Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang ini menggunakan 4 fungsi terkait yaitu fungsi pengguna anggaran, fungsi bendahara pengeluaran, fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, dan fungsi Kuasa BUD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gagas (2017) ini menyatakan bahwa fungsi terkait yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Singkawang dalam sistem akuntansi penggajian sudah sesuai dengan kajian teori.

4.2 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan dokumen yang digunakan pada Sistem Akuntansi Penggajian BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Dokumen yang Digunakan	Praktik		Penjelasan
	Ada	Tidak	
Surat Penyediaan Dana (SPD)			BPKAD menggunakan SPD untuk menunjukkan tersedianya dana untuk diserap dan sebagai proses untuk penerbitan SPP
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)			BPKAD menggunakan SPP untuk mengajukan permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran
Surat Perintah Membayar (SPM)			BPKAD menggunakan SPM untuk penerbitan SP2D
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			BPKAD menggunakan SP2D untuk mencairkan uang pada bank
Bukti Transfer			BPKAD menggunakan bukti transfer untuk dokumen atas transfer pengeluaran daerah

Dari tabel 4.5 hasil perbandingan dokumen yang digunakan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD dengan Kajian teori Permendagri No. 64

Tahun 2013 dapat dilihat bahwa dokumen yang digunakan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD sudah sesuai dengan teori Permendagri No. 64 Tahun 2013.

Sistem akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD sudah menggunakan ke 5 dokumen yaitu Surat Penyedia Dana (SPD), Surat Permintaan Pembyaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Bukti Transfer, dan dinyatakan sudah sesuai dengan kajian teori Permendagri No. 64 Tahun 2013.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gagas (2017) dengan judul penelitian Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang ini menggunakan 5 dokumen yaitu Surat Penyedia Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana, dan Bukti Transfer. Hasi penelitian yang dilakukan oleh Gagas (2017) ini menyatakan bahwa dokumen yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Singkawang dalam sistem akuntansi penggajian sudah sesuai dengan kajian teori.

4.3 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan catatan akuntansi yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Catatan yang Digunakan	Praktik		Penjelasan
	Ada	Tidak	
Buku Jurnal Pengeluaran Kas			Buku jurnal pengeluaran kas diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atad kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas
Buku Besar			Buku besar diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mem- <i>posting</i> semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.
Buku Besar Pembantu			Buku besar pembantu ini tidak digunakan oleh BPKAD dikarenakan semua transaksi pada suatu periode dapat dilihat secara langsung pada buku besar karena BPKAD sudah menggunakan sistem informasi akuntansi penggajian yang terkomputerisasi.

Dari tabel 4.6 hasil perbandingan Catatan Akuntansi Yang Digunakan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD dengan Kajian teori Permendagri No. 64 Tahun 2013 dapat dilihat bahwa Catatan Akuntansi Yang Digunakan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD belum sesuai

dengan teori Permendagri No. 64 Tahun 2013. Sistem penggajian pada BPKAD ini hanya menggunakan 2 catatan akuntansi yaitu buku jurnal pengeluaran kas dan buku besar.

Sedangkan menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 Catatan Akuntansi Yang Digunakan sistem penggajian pegawai itu ada 3 Catatan Akuntansi Yang Digunakan sistem akuntansi penggajian pegawai. Menurut Erlina, 2015 : 712 Dalam sistem informasi akuntansi penggajian PNS catatan akuntansi buku besar pembantu harus digunakan untuk transaksi dari buku besar yang dianggap perlu karena OPD akan kesulitan dalam membedakan suatu transaksi atau kejadian.

Adapun alasan BPKAD tidak menggunakan 1 Catatan Akuntansi yaitu Buku besar pembantu dengan alasan semua transaksi pada suatu periode dapat dilihat secara langsung pada buku besar karena BPKAD sudah menggunakan sistem informasi akuntansi penggajian yang terkomputerisasi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gagas (2017) dengan judul penelitian Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang ini menggunakan 2 Catatan Akuntansi yaitu Buku Jurnal Pengeluaran Kas, dan Buku Besar. Hasil penelitian yang dilakukan Gagas (2017) ini menyatakan bahwa Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian pegawai pada sekretariat daerah ini belum sesuai dengan Permengari No. 64 Tahun 2013.

4.4 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan jaringan prosedur pada Sistem Akuntansi Penggajian BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Jaringan Prosedur	Praktik		Penjelasan
	Ada	Tidak	
Prosedur Penerbitan SPD			Pegelola menerima dokumen anggaran kas, setelah SPD diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah maka akan di proses penerbitan SPP.
Prosedur Pengajuan SPP			Bendahara menerima dokumen dan dilakukan proses penerbitan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
Prosedur Penerbitan SP2D			Petugas loket menerima berkas dan akan dibuatkan register penerimaan SPM, setelah semua sudah sesuai maka akan dilanjutkan dengan penerbitan SP2D sesuai dengan SPM.

Dari tabel 4.7 hasil perbandingan prosedur sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD dengan Kajian teori Permendagri No. 64 Tahun 2013 dapat dilihat bahwa prosedur sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD sudah sesuai dengan teori Permendagri No. 64 Tahun 2013.

Sistem akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD sudah menggunakan ke 3 prosedur penggajian yaitu prosedur penerbitan SPD, prosedur pengajuan SPP, dan

prosedur penerbitan SP2D, sudah sesuai dengan kajian teori Permendagri No. 64 Tahun 2013.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gagas (2017) dengan judul penelitian Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang ini menggunakan 3 prosedur penggajian yaitu prosedur penerbitan SPD, prosedur pengajuan SPP, dan prosedur penerbitan SP2D. Hasil penelitian oleh Gagas (2017) untuk prosedur penggajian pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang sudah sesuai dengan kajian teori.

5.KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi terkait dalam sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan kajian teori Permendagri No. 64 Tahun 2013. Walaupun sistem penggajian PNS pada BPKAD ini hanya menggunakan 4 fungsi terkait yaitu Bendahara pengeluaran, Pejabat penatausahaan keuangan OPD, Kuasa BUD, dan pengguna anggaran. Sedangkan menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 fungsi terkait sistem penggajian itu ada 5 fungsi terkait sistem akuntansi penggajian. Tetapi dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 Untuk sistem akuntansi penggajian PNS itu cukup menggunakan 4 fungsi terkait saja, karena untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan itu hanya digunakan untuk fungsi terkait sistem penggajian Honorer.
2. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penggajian pegawai sudah sesuai dengan kajian teori Permendagri No. 64 Tahun 2013. BPKAD menggunakan kelima dokumen yang harus ada dalam sistem akuntansi penggajian pegawai yaitu SPD, SPP, SPM, SP2D, dan Bukti Transfer. Berdasarkan temuan yang ada semua dokumen sudah diterapkan dengan baik.
3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penggajian pegawai belum sesuai dengan kajian teori Permendagri No.64 Tahun 2013 yang menyatakan terdapat 3 catatan akuntansi yang harus ada dalam sistem informasi akuntansi penggajian pegawai yaitu buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, buku besar pembantu. Pada BPKAD catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian hanya menggunakan 2 catatan akuntansi yaitu buku jurnal pengeluaran kas dan buku besar. Sedangkan buku besar pembantu tidak digunakan oleh BPKAD dikarenakan semua transaksi pada suatu periode dapat dilihat secara langsung pada buku besar karena BPKAD sudah menggunakan sistem informasi akuntansi penggajian yang terkomputerisasi.
4. Prosedur dalam sistem akuntansi penggajian pegawai sudah sesuai dengan kajian teori Permendagri No.64 Tahun 2013. BPKAD menggunakan 3 prosedur yang harus ada dalam sistem akuntansi penggajian pegawai yaitu prosedur penerbitan SPD, prosedur pengajuan SPP, dan prosedur penerbitan SP2D.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Pembimbing I dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Diskhamarzeweny, SE., MM sebagai Dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya dalam membimbing peneliti.
5. Ibu Rina Andriani, SE., M.Si selaku dosen Metodologi Penelitian yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
6. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.
8. Bapak Deva Wisnu Rianto selaku Ketua UED-SP Usaha Bersama Sitorajo Kari yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di UED-SP Usaha Bersama Sitorajo Kari.
9. Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah banyak membantu peneliti dalam memperoleh data-data dan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.
10. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Syamsuardi dan Ibunda Cindarwati, Abangku Zulfahri, Zuhadi, Arnadi Fitri, Zusrisal, dan Kakakku Reska Wati yang selalu memberikan do'a serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
11. Teman-teman seperjuangan Wira, Sukran, Risma, Kak Welly, Yuni, Kak Ina, Ranti, Elen, Lesi, Kak Peb, Welly, Nova, dan Indri.
12. Sahabat ku Opi Safitri, Windy Armi, dan Nursya Fitri.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. 1990. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: BPPK.

- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufu. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.
- Hartadi, Bambang. 2013. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, N. Dan B. Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Krismiaji, 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Madiun: Universitas Widya Mandala Madiun.
- Marjuni, Sukmawati. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makasar : Sah Media.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, 2016. *Sistem akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Romney, Marshall.B. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13. Salemba Empat.
- Romney, M. B. 1997. *Accounting Information System*. Addison Wesley Longman, Inc. New York.
- Soemarso, S. R. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar* Buku 2 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-11). Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tua, Marihot. E. H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wilkinson, J. W. 1995. *Accounting Information System, third edition*. Binarupa Aksara, Jakarta.

Jurnal dan Hasil Penelitian:

- Agrianto, R.S, dkk. 2014. *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Duta Paper Prigen Pasuruan)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 7, Nomor 1, Januari 2014.
- Danke, Yuanita. 2012. *Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Perusahaan Plastik Injection)*, Jurnal Akuntansi, Volume 1, Nomor 1, Januari 2012.

- Firdaus, Faizal. 2012. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat*, Skripsi IPB, 2012.
- Hidayat, M.T, dkk. 2013. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Kasus pada PT. Cahaya Marta Perkasa, Pemekasan)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 6, Desember 2013.
- Mandagi, M.S & Ilat, Ventje. 2015. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian Pada Kantor Jasa Penilaian Publik Benedictus Damapuspita Dan Rekan di Jakarta*, Jurnal EMBA, Volume 3, Nomor 2, Juni 2015.
- Qudus, Iradatul, dkk. 2015. *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. SUN STAR MOTOR Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 25, Nomor 2, Agustus 2015.
- Saraswati, K.M, dkk. 2014. *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian & Pengupahan Karyawan Dalam Usaha Meningkatkan Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sidoarjo)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 8, Nomor 1, Februari 2014.
- Saraswati, Violita, dkk. 2014. *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Sebagai Upaya Mendukung Tujuan Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Pada Hotel Batu Permai Kota Batu)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 15, Nomor 2, Oktober 2014.
- Setiyowati, W.N. 2016. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian (Studi Kasus Pada KSU BHAKTI MULYA Kota Blitar)*, Artikel Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016.
- Widyasari, Nitiya. 2012. *Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada RSUD Kota Semarang*, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2018. *Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga*. Bupati Kuantan Singingi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Menteri Dalam Negeri.